



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERIKANAN**

Jl. SUMARGO No.2 Lamongan – Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321039 Fax. (0322) 321347 E-mail: diskan@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

DINAS PERIKANAN

KABUPATEN LAMONGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko organisasi termasuk adanya kegiatan indentifikasi, perencanaan, startegi, dan penilaian hal-hal negative yang dapat terjadi. Penerpana manajemen risiko berpijak apda konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan teriintegrasi dengan startegi manajemen. Proses atau fungsi manajemen resiko sering diterjemahkan dalam tiga Langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen resiko diharapkan dapat membuat organisasi menajdi sadar resiko dan lebih berhati-hati dalam pengambilan Keputusan dengan tujuan organisasi dapat mengambil Keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan emerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib mealakukan penilaian Risiko, sehingga Organisasi Perangkat Daerah diharapkan mampu mengindentifikasi penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana kegiatan.

Oleh karena itu diperlukan penilaian atas resiko yang dimiliki sehingga dapat ditentukan Tindakan pencegahan dan solutif terhadap resiko yang akan hidapi sesuai dengan skala penilaian risiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2024 bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan Solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan penilaian Resiko tahun 2024 di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan intensitas terjadinya resiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Dinas Perikanan selaku pelaksana urusan desentralisasi dan Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lamongan telah Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan, Adapun resiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan operasional. kondisi lingkungan pengendalian Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengndalian Intern
Control Environment Evaluation (CEE)

No	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)												SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	Modus		
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA													
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	Memadai	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	Memadai	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	Memadai	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	3	4	3	3	3	2	4	2	3	3	Memadai	
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI													
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	2	3	3	4	3	3	3	2	3	3	Memadai	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	2	3	3	4	3	4	4	2	3	3	Memadai	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	Memadai	
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF													
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	Memadai	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	Memadai	

[illegible]

1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	2	4	3	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	2	3	3	3	2	4	4	3	3	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	2	3	3	3	3	3	4	2	3	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF												
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT												
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	Memadai

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan mitigasi Resiko memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai sebagaimana berikut :

- 1. Perlunya peningkatan evaluasi dan peningkatan kapasitas pegawai intern pengawas dalam OPD;
- 2. Adanya beberapa pegawai yang belum mengikuti kegiatan DIKLATPIM ataupun pelatihan pengembangan peningkatan SDM;
- 3. Optimalisasi peran pimpinan sebagai agen perubahan dan pemberian contoh yang baik oleh pimpinan;
- 4. Dokumen peta jabatan dan ANJAB masih dalam proesen penyempurnaan akibat mengikuti perubahan kebijakan terkait pengelolaan kepegawaian;
- 5. Masih perlunya peningkatan pemahaman terhadap target dan kinerja yang hendak dicapai oleh masing-masing pegawai;
- 6. Perlunya tindak lanjut dalam dokumen hasil LHP secara menyeluruh.

Guna mengatasi lignkungan pengendalian yang kurang memadai di atas maka diperlukan beberapa startegi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap lingkungan pengendalian sebagaimana tabel sebagai berikut :

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	perlunya peningkatan evaluasi dan kapasitas pengawas intern dalam OPD	Evaluasi rutin tribulanan disertai dengan tanggapan pimpinan dan dokumen tindak lanjut	Tim RB Dinas perikanan	Maret
2	Adanya beberapa pegawai belum mengikuti DIKLATPIM atau Pelatihan peningkatan SDM	Pembuatan dokumen dan pengiriman usulan serta berkoordinasi kepada BKPSDM Kabupaten Lamongan agar mendapat kuota pelatihan	Sekretaris Dinasi/Kasubag.Umum dan kepegawaian	Maret
3	optimalisasi peran pimpinan sebagai agen perubahan dan contoh yang baik	Pimpinan memberikan contoh kepemimpinan yang baik melalui pemberian pembinaan secara rutin kepada setiap legawai	Kepala Dinas Perikanan	Juli
4	Dokumen peta jabatan dan anjab masih dalam proses penyesuaian dengan peraturan terbaru	Koordinasi dan penyempurnaan dokumen anjab dan peta jabatan ke bagian organisasi dan BKPSDM	Kasubag.Umum dan Kepegawaian	Juli
5	Perlunya peningkatan pemahaman terhadap target dan kinerja yang harus dicapai	Evaluasi tribulanan melalui evaluasi dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	Kepala Dinas Perikanan/Kasubag.Perencanaan dan Evaluasi	Maret,Juni,September,Desember
6	Adanya beberapa pegawai belum mengikuti DIKLATPIM atau Pelatihan peningkatan SDM	Pembuatan dokumen dan pengiriman usulan serta berkoordinasi kepada BKPSDM Kabupaten Lamongan agar mendapat kuota pelatihan	Sekretaris Dinasi/Kasubag.Umum dan kepegawaian	Maret
7	Perlunya tindak lanjut dalam dokumen LHP secara menyeluruh	Pembuatan dokumen laporan tindak lanjut disertai dengan lampiran bukti hasil tindak lanjut temuan LHP	Kepala Dinas Perikanan	April,Juli,Oktober,Desember
8	Peningkatan kualitas terhadap instansi terkait	Perlunya peningkatan hubungan kerjasama dengan instansi terkait	Kepala Dinas Perikanan	April

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Tujuan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan selaras dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten lamongan, dimana di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yaitu *”Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan”*. Tujuan Dinas Perikanan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang hendak dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan.

Oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pada Renstra Dinas Perikanan tahun 2021-2026 makan ditetapkan tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, yang selaras dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi 2 tujuan yaitu :

- 1. Meningkatkan Produksi Perikanan dan;
- 2. Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan

B. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan bahwa Dinas Perikanan sebagai pelaksana tugas desentralisasi sektor Pembangunan Perikanan di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis yang terbagi ke dalam resiko startegis dan resiko operasional sebagaimana matriks yang disajikan sebagai berikut :

Tabel Matriks Resiko Strategis Dinas Perikanan

Kertas Kerja Strategis OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan							
Nama OPD		Dinas Perikanan							
Tahun Penilaian		2024							
Periode yang Dinilai		2024							
Tujuan Strategis		Meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani							
Urusan Pemerintahan		Kelautan dan perikanan							
OPD yang dinilai		Dinas Perikanan							
Tujuan Strategis Pemerintah		Meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani							
Sasaran		Meningkatnya produktivitas tanaman pangan Meningkatkan produktivitas hortikultura Meningkatkan produktivitas perkebunana Meningkatkan pendapatan petani Meningkatkan manajemen internal OPD							
No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Fishing Ground Semakin Jauh,Ketaatan terhadap alur penangkapan ikan	RST01	Kepala Dinas Perikanan	1. Penangkapan ikan Secara Berlebihan 2. Pengetahuan nelayan atas alur penangkapan ikan yang minim	Eksternal	C	1. Peningkatan biaya produksi 2. Pelanggaran terhadap batas wilayah penangkapan ikan	Nelayan
2	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Kurangnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap,Ketersediaan dan Penjaminan Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan	RST02	Kepala Dinas Perikanan	1. Belum Optimalnya Frekuensi dan Calupan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 2. Kurangnya Sarana Penangkapan Ikan Modern	Internal	C	1. Penggunaan alat tangkap destruktif dan kerusakan ekosistem sumberdaya perikanan 2. Penggunaan alat tangkap dilarang	Nelayan
3	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Cuaca/iklim	RST03	Kepala Dinas Perikanan	Perubahan Iklim	Eksternal	UC	Berkurangnya Trip Melaut	Nelayan
4	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Banjir	R5B01	Kepala Dinas Perikanan	Cuaca/iklim	Eksternal	UC	Gagal Panen/Hasil Panen Berkurang	Pembudidaya ikan

5	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Penggunaan Benih ikan unggul kurang,Minimnya penerapan CBIB (manajemen perikanan sehat)	RSB02	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurang penyediaan benih berkualitas 2. Budidaya masih bersifat tradisional	Internal	C	1. Hasil produksi perikanan tidak optimal 2. Budidaya ikan rawan serangan hama/Ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi	Pembudidaya ikan
6	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Hama Penyakit Ikan,Ketersediaan Sarpras Budidaya	RSB03	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurangnya pengetahuan pengelolaan lingkungan budidaya 2. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha budidaya	Eksternal	C	1. Gagal Panen/Hasil Panen Berkurang 2. Proses budidaya masih bersifat tradisional tidak bisa berkembang	Pembudidaya ikan
7	Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)	Kurangnya diversifikasiNilai tambah produk hasil perikanan,Kurangnya akses pemasaran produk perikanan	RSK01	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurangnya Pengetahuan Diversifikasi produk olahan 2. Akses pemasaran masih dibatasi oleh batas daerah	Internal	C	1. Jenis dan Nilai tambah produk perikanan rendah/belum bervariasi 2. Terbatasnya wilayah pemasaran	PELAKU USAHA PERIKANAN
8	Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)	Biaya Produksi Tinggi	RSK02	Kepala Dinas Perikanan	Tingginya biaya sarana produksi perikanan	Eksternal	C	Penurunan Kesejahteraan/Indeks harga yang diterima rendah	PELAKU USAHA PERIKANAN

Tabel Matrik Operasional Dinas Perikanan

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan											
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Nama OPD		Dinas Perikanan									
Tahun Penilaian		2024									
Periode yang Dinilai		2024									
Tujuan Strategis											
Sasaran strategis OPD											
Urusan Pemerintahan		Kelautan dan perikanan									
OPD yang Dinilai		Dinas Perikanan									
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		CAUC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Disediakan	Perencanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Data Dokumen Perencanaan Penyediaan Kebutuhan sarana Prasarana Usaha Belum Tersedia	ROT01.01	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Keterbatasan Pegawai Dinas Perikanan Penyedia Data	Internal	C	Pemberian bantuan tidak optimal	Nelayan
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Pelaksanaan	Risiko Freaud Adanya Kelompok Yang Belum Meningkat Kelas Kelompoknya	ROT01.02	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kelengkapan Persyaratan Berkas Kelompok Tidak memenuhi Syarat	Eksternal	C	Fasilitasi Pemberian bantuan kepada kelompok tidak optimal	KUB
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	% Tempat Pelelangan Ikan Yang Memiliki SOP	Perencanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Tersdapt beberapa TPI belum memiliki SOP	ROT01.03	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Keterbatasan Anggaran Dalam Penyusunan SOP	Internal	C	Alur Pelayanan Pelelangan Ikan Untuk Nelayan kurang optimal	Nelayan
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	% Tempat Pelelangan Ikan Yang Memiliki SOP	Pelaksanaan	Risiko Freaud Alur penerimaan PAD dalam pelayanan TPI belum optimal	ROT03.02	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Belum terdapatnya SOP dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	Internal	C	Penurunan PAD sektor pengelolaan TPI	Pemerintah Kab.Lamongan
5	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (Orang/Pembudidaya)	Pelaksanaan	Risiko Freaud Adanya pembudidaya kelompok pembudidaya yang tidak mendapat akses pemodalan	ROB01.02	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Kelengkapan Persyaratan Berkas Kelompok Tidak memenuhi Syarat	Eksternal	C	Fasilitasi Pemberian bantuan kepada kelompok tidak optimal	Pembudidaya Ikan
6	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan	Pelaksanaan	Risiko Freaud Masih tingginya penggunaan alat tangkap perikanan dilarang	ROPengawas.01.02	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Perundang-Undangan Perikanan	Eksternal	C	Destructive Fishing	PELAKU USAHA PERIKANAN

C. Hasil Analisis Risiko

Berdasarkan pada matriks resiko strategis dan operasional di atas maka dapat dilakukan analisis terkait skala resiko yang akan dihadapi dalam Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak risiko dapat kami sajikan melalui tabel berikut :

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Dinas Perikanan	Fishing Ground Semakin Jauh,Ketaatan terhadap alur penangkapan ikan	RST01	16	Kepala Dinas Perikanan	1. Penangkapan ikan Secara Berlebihan 2. Pengetahuan nelayan atas alur penangkapan ikan yang minim	1. Peningkatan biaya produksi 2. Pelanggaran terhadap batas wilayah penangkapan ikan
2	Dinas Perikanan	Kurangnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap,Ketersediaan dan Penjaminan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	RST02	13	Kepala Dinas Perikanan	1. Belum Optimalnya Frekuensi dan Cakupan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 2. Kurangnya Sarana Penangkapan Ikan Modern	1. Penggunaan alat tangkap destruktif dan kerusakan ekosistem sumberdaya perikanan 2. Penggunaan alat tangkap dilarang
3	Dinas Perikanan	Cuaca/iklim	RST03	21	Kepala Dinas Perikanan	Perubahan iklim	Berkurangnya Trip Melaut
4	Dinas Perikanan	Banjir	RSB01	16	Kepala Dinas Perikanan	Cuaca/iklim	Gagal Panen/Hasil Panen Berkurang
5	Dinas Perikanan	Penggunaan Benih ikan unggul,Minimnya penerapan CBIB (manajemen perikanan sehat)	RSB02	11	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurang penyediaan benih berkualitas 2. Budidaya masih bersifat tradisional	1. Hasil produksi perikanan tidak optimal 2. Budidaya ikan rawan serangan hama/Ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi
6	Dinas Perikanan	Hama Penyakit Ikan,Ketersediaan Sarpras Budidaya	RSB03	15	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurangnya pengetahuan pengelolaan lingkungan budidaya 2. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha budidaya	1. Gagal Panen/Hasil Panen Berkurang 2. Proses budidaya masih bersifat tradisional tidak bisa berkembang
7	Dinas Perikanan	Kurangnya diversifikasiNilai tambah produk hasil perikanan,Kurangnya akses pemasaran produk perikanan	RSK01	18	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurangnya Pengetahuan Diversifikasi produk olahan 2. Akses pemasaran masih dibatasi oleh batas daerah	1. Jenis dan Nilai tambah produk perikanan rendah/belum bervariasi 2. Terbatasnya wilayah pemasaran
8	Dinas Perikanan	Biaya Produksi Tinggi	RSK02	19	Kepala Dinas Perikanan	Tingginya biaya sarana produksi perikanan	Penurunan Kesejahteraan/Indeks harga yang diterima rendah

Adapun rencana tindak pengendalian (RTP) terhadap risiko di atas yang berisi jadwal, celah pengendalian, pemilik/penanggung jawab, serta jadwal rencana target waktu penyelesaian risiko yang dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks formulis kertas kerja sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja							
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan							
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Pemda							
Unsur Pemerintahan	Kelautan dan perikanan						
Dinas Terkait	Dinas Perikanan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:							
1	Fishing Ground Semakin Jauh/Ketatan terhadap alur penangkapan ikan	RST01	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan	Belum pahamiya alur penangkapan ikan oleh nelayan	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Juli
2	Kurangnya Penguasaan Usaha Perikanan Tangkap,Ketersediaan dan Penjaminan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	RST02	Frekuensi kegiatan pengawasan masih sedikit dan pemberian bantuan serpris penangkapan ikan	cakupan wilayah pengawasan terbatas dan terbatasnya bantuan serpris penangkapan ikan	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Kepala Bidang pengawasan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Juli
3	Cuaca/Klim	RST03	Pembagian peta prakiraan cuaca	Cuacaklim tidak dapat diandalkan	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Kepala Dinas Perikanan	Maret
4	Benjir	RSB01	Pembagian peta prakiraan cuaca	Cuacaklim tidak dapat diandalkan	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Kepala Dinas Perikanan	Maret
5	Penggunaan Benih ikan unggul kurang Minimya pemersan CBIS (manajemen perikanan sehat)	RSB02	Pembinaan budidaya perikanan dan penyediaan bantuan benih unggul	Cakupan pemberian bantuan benih unggul dan rendahnya tingkat penggunaan benih unggul	Revitalisasi BSI Kabupaten Lamongan sebagai bentuk intervensi penyediaan benih unggul	Kepala Dinas Perikanan	Agustus
6	Hama Penyakit Ikan,Ketersediaan Serpris Budidaya	RSB03	Sosialisai HPI dan bantuan serpris budidaya	Rendahnya pengetahuan budidaya tentang pemahaman HPI ikan	Monvri dan Lab Kesehatan Keliling	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Juni
7	Kurangnya diversifikasi/tambah produk hasil perikanan/Kurangnya akses pemasaran produk perikanan	RSK01	Pelatihan olahan hasil perikanan	Produk Olahan perikanan belum terstandaritasi dengan optimal	Feisitasi pameran untuk memperluas pemasaran produk olahan perikanan	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Oktober
8	Biaya Produk Tinggi	RSK02	Bantuan serpris produksi perikanan	Tingkat intervensi bantuan dalam menekan biaya produksi	Optimalisasi dan peningkatan bantuan serpris produksi perikanan	Kepala Dinas Perikanan	Oktober
Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:							
1	Risiko Pemangku Kepentingan Data Dokumen Perencanaan Penyediaan Kebutuhan sarana Prasarana Usaha Belum Tersedia	ROT.01.01	Penyediaan sarana prasarana perikanan masih mengacu kepada usulan	Cakupan penerimaan bantuan	Penyediaan bantuan berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan penyediaan serpris perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Oktober
2	Risiko Fraud Adanya Kelompok Yang Belum Meningkatkan Kelas Katompoknya	ROT.01.02	Kelas kelompok rata-rata masih pemula	Kurangnya kesadaran administrasi kelompok	Pembinaan dan pendampingan administrasi kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Oktober
3	Risiko Pemangku Kepentingan Terdapat beberapa TPI belum memiliki SOP	ROT.01.03	Tersedianya SOP dalam pelayanan TPI	SOP Belum dilaksanakan secara maksimal	Sosialisai pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Mai
4	Risiko Fraud Alur penerimaan PAD dalam pelayanan TPI belum optimal	ROT.03.02	Kerjasama dengan Bank Dalam pembayaran penerimaan PAD	Terdapat selisih penerimaan PAD	Optimalisasi digital banking melalui layanan QRIS	Kepala Dinas Perikanan	Mai
5	Risiko Fraud Adanya pembudidaya kelompok pembudidaya yang tidak mendapat akses pemodalan	ROB.01.02	Sosialisai dan pendampingan kelompok	Kelengkapan berkas administrasi kelompok	Pemodampingan administrasi kelompok	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Koordinator penyuluh	Juli
6	Risiko Fraud Alur tingginya penggunaan alat tangkap perikanan dilarang	ROPengawasan.01.02	Sosialisasi dan pendampingan terhadap nelayan yang tertangkap operasi	Rasio pengontrolan alat tangkap yang dilarang masih rendah	Optimalisasi pemberian alat pengganti ramah lingkungan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Oktober

D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan terhadap penanggulangan risiko startegis dan operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja						
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2024				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Kelautan dan perikanan				
Dinas Terkait		Dinas Perikanan				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Dipertukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:						
1	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal.	Berita acara pelaksanaan kegiatan dan penerimaan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Agustus	Juni	Telah dilaksanakan
2	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Dokumen hasil pemeriksanaan	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan (Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan)	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan
3	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Dokumen peta prakiraan cuaca	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan
4	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Dokumen peta prakiraan cuaca	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan
5	Revitalisasi BBI Kabupaten Lamongan sebagai bentuk intervensi penyediaan benih unggul	Dokumen pengawasan revitalisasi BBI	Crosscheck progress pembangunan fisik lapangan (Kabid.Perikanan Budidaya)	Juni,Agustus	Juni	Dilaksanakan kunjungan lapangan
6	Moneyv dan Lab.Kesehatan Keliling	Dokumen hasil uji kesehatan ikan dan lingkungan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan pemantauan Lab.Keliling
7	Fasilitasi pameran untuk mempertuas pemasaran produk olahan perikanan	Laporan pelaksanaan hasil kegiatan pameran	Kepala Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Juli	Belum dilaksanakan	Info pameran masih dicari
8	Optimalisasi dan peningkatan bantuan sarpras produksi perikanan	Dokumen proposal, penerima HIBAH, dan SKT Kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Pelaksanaan pemberian bantuan masih dilaksanakan sebagian
Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:						
1	Penyediaan bantuan berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan penyediaan sarpras perikanan	Input usulan masyarakat melalui SIPD	Kesubag.Perencanaan dan Evaluasi	Januari	Januari	Telah dilakukan pemanatauan
2	Pembinaan dan pendampingan administrasi kelompok	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kelompok	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Pendampingan telah dilakukan
3	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Evaluasi kepatuhan penerapan pelayanan SOP Pelayanan TPI	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPTTPI	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Evaluasi dilakukan secara rutin tribulanan
4	Optimalisasi digital banking melalui layanan QRIS	Crosschek laporan penerimaan PAD dengan karcis retribusi	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPTTPI serta Bank Jatim	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Evaluasi penerimaan PAD dilakukan secara rutin
5	Pemndampingan administrasi kelompok	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kelompok	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Checklist kelengkapan dokumen
6	Optimalisasi pemberian alat pengganti ramah lingkungan	Proposal Usulan kelompok dan SKT Kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Maret-Agustus	Maret	Pelaksanaan masih pada tahap I di bulan maret

E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Formulir Kertas Kerja							
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan							
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian		2024					
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan		Kelautan dan perikanan					
Dinas Terkait		Dinas Perikanan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Unaian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:							
1	Fishing Ground Semakin jauh.Ketetaan terhadap alur penangkapan ikan	RS101	Sosialisai dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan	Belum pahamnya alur penangkapan ikan oleh nelayan	Sosialisai dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Juli
2	Kurangnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap,Ketersediaan dan Penjaminan Senam dan Prasana Penangkapan Ikan	RS102	Fekuesi kegiatan pengawasan masih sedikit dan pemberian bantuan sarpras penangkapan ikan	calupan wilayah pengawasan terbatas dan terbatasnya bantuan sarpras penangkapan ikan	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Kepala Bidang pengawasan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Juli
3	Cuaca/Klim	RS103	Pembagian peta prakiraan cuaca	Cuaca/klim tidak dapat diidentifikasi	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Kepala Dinas Perikanan	Maret
4	Benjir	RS801	Pembagian peta prakiraan cuaca	Cuaca/klim tidak dapat diidentifikasi	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Kepala Dinas Perikanan	Maret
5	Penggunaan Benih ikan unggul kurang.Minimnya penerapan CBIB (manajemen perikanan sehat)	RS802	Pembinaan budidaya perikanan dan penyediaan bantuan benih unggul	Cakupan pemberian bantuan benih unggul dan rendahnya tingkat penggunaan benih unggul	Revitalisasi BBI Kabupaten Lamongan sebagai bentuk intervensi penyediaan benih unggul	Kepala Dinas Perikanan	Agustus
6	Hama Penyakit Ikan,Ketersediaan Sarpras Budidaya	RS803	Sosialisasi HPI dan bantuan sarpras budidaya	Rendahnya pengetahuan budidaya tentang pemahaman HPI ikan	Moneyv dan Lab.Kesehatan Keliling	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Juni

7	Kurangnya diversifikasi/nilai tambah produk hasil perikanan/Kurangnya akses pemasaran produk perikanan	RSK01	Pelatihan diarah hasil perikanan	Produk Olahan perikanan belum terstandarisasi dengan optimal	Fasilitasi pameran untuk memperluas pemasaran produk olahan perikanan	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Oktober
8	Biaya Produksi Tinggi	RSK02	Bantuan sarpras produksi perikanan	Tingkat intervensi bantuan dalam menekan biaya produksi	Optimalisasi dan peningkatan bantuan sarpras produksi perikanan	Kepala Dinas Perikanan	Oktober

Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan

1	Risiko Pemangku Kepentingan Data Dokumen Perencanaan Penyediaan Kebutuhan sarana Prasarana Usaha Belum Tersedia	ROT.01.01	Penyediaan sarana prasarana perikanan masih mengacu kepada usulan	Cakupan penerimaan bantuan	Penyediaan bantuan berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan penyediaan sarpras perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Oktober
2	Risiko Fraud Adanya Kelompok Yang Belum Meningkatkan Kelas Kelompoknya	ROT.01.02	Kelas kelompok rata-rata masih pemula	Kurangnya ketrampilan administrasi kelompok	Pembinaan dan pendampingan administrasi kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Oktober
3	Risiko Pemangku Kepentingan Tersedap beberapa TPI belum memiliki SOP	ROT.01.03	Tersedianya SOP dalam pelayanan TPI	SOP belum dilaksanakan secara maksimal	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Mei
4	Risiko Fraud Alur penerimaan PAD dalam pelayanan TPI belum optimal	ROT.03.02	Kerjasama dengan Bank Dalam pembayaran penerimaan PAD	Terdapat selisih penerimaan PAD	Optimalisasi digital banking melalui layanan QRIS	Kepala Dinas Perikanan	Mei
5	Risiko Fraud Adanya pembudidaya/kelompok pembudidaya yang tidak mendapat akses pemodal	ROB.01.02	Sosialisasi dan pendampingan kelompok	Kelengkapan berkas administrasi kelompok	Pemidampingan administrasi kelompok	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Koordinator penyuluh	Juli
6	Risiko Fraud Masih tingginya penggunaan alat tangkap perikanan dilarang	ROPengawas.01.02	Sosialisasi dan pendampingan terhadap nelayan yang tertangkap operasi	Rasio penggantian alat tangkap yang dilarang masih rendah	Optimalisasi pemberian alat pengganti ramah lingkungan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Oktober

BAB IV

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Kesuksesan Pengendalian risiko startegis dan operasional OPD salat satunya dipengaruhi oleh factor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan. Berikut akan dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Dinas Perikanan ke dalam matriks sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun							
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Kelautan dan perikanan						
Dinas Terkait	Dinas Perikanan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:							
1	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal.	Pemberian modul pembagian alur penangkapan Ikan	Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perikanan Lamongan	Nelayan	Maret	April	Alur penangkapan ikan sangat berperan sebagai sarana navigasi perahu
2	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Dokumen MOU	Dinas Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan	Maret,Juni,September	-	Peningkatan kerjasama dapat memberikan dampak dalam penambahan cakupan pengawasan
3	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Pemberian Peta Prakiraan Cuaca	BMKG Juanda	Nelayan	Januari-Desember	Januari-Juni	Realisasi pemberian peta prakiraan cuaca sudah dilaksanakan setiap bulan
4	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Pemberian Peta Prakiraan Cuaca	BMKG Juanda	Nelayan	Januari-Desember	Januari-Juni	Realisasi pemberian peta prakiraan cuaca sudah dilaksanakan setiap bulan
5	Revitalisasi BBI Kabupaten Lamongan sebagai bentuk intervensi penyediaan benih unggul	Sosialisasi dan Website OPD	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	Pembudidaya Ikan	Maret	April	Revitalisasi BBI diharapkan dapat memberikan peningkatan kontribusi terhadapana produksi perikanan
6	Monev dan Lab Kesehatan Keliling	Pengumuman jadwal monev Lab.Kesehatan Ikan keliling melalui papan pengumuman dan website OPD	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	Pembudidaya Ikan	Maret,Juni	Maret,Juni	Monitoring Lab Keliling Dilaksanakan setiap tribulan
7	Fasilitasi pameran untuk memperluas pemasaran produk olahan perikanan	Sosialisasi dan Website OPD	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	Pelaku Usaha Perikanan	Maret,Juni,September	Juni	Pelatihan berupa pameran dan pemberian akses informasi melalui marketplace dan sosial media
8	Optimalisasi dan peningkatan bantuan sarpras produksi perikanan	Sosialisasi kepada kelompok penerima bantuan hibah	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	Pelaku Usaha Perikanan	Maret,Juni,September	Juni	Pelaksanaan bantuan sarpras perikanan masih terkendala dalam proses adminisitrasi kelompok
Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:							
1	Penyediaan bantuan berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan penyediaan sarpras perikanan	Kamus Usulan Dinas Perikanan (SIPO-RI)	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	Pelaku Usaha Perikanan	Januari	Januari	Dokumen kamus usulan telah terinput di aplikasi SIPO
2	Pembinaan dan pendampingan administrasi kelompok	Sosialisasi	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	KUB,POKDAKAN,POKMASWAS,POKLAHSAR	Maret,Juni,September	Maret,Juni,September	Pendampingan adminstrasi kelompok telah dilaksanakan
3	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Sosialisasi dan pembuatan papan informasi alur pelayanan TPI	UPT.Tempat Pelelangan Ikan	Pengguna Layanan TPI	Maret,Juni,September	Maret,Juni,September	Kelancaran arus pelayanan TPI
4	Optimalisasi digital banking melalui layanan QRIS	Sosialisasi kepada nelayan melalui pengeras suara	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dan Bank Jatim Capem Lamongan	Pengguna Layanan TPI	Maret,Juni,September	Maret,Juni,September	Layanan digital dalam penerimaan PAD diharapkan dapat memenuhi kemudahan aksesibilitas dan transparansi
5	Pemndampingan administrasi kelompok	Sosialisasi	Dinas Perikanan	KUB,POKDAKAN,POKMASWAS,POKLAHSAR	Maret,Juni,September	Maret,Juni,September	Pendampingan adminstrasi kelompok telah dilaksanakan
6	Optimalisasi pemberian alat pengganti ramah lingkungan	Sosialisasi dan pemberian buku alat tangkap yang dilarang	Dinas Perikanan Lamongan	Pelaku usaha penangkapan ikan	Juni	Juni	Telah dilaksanakan

BAB V

Rancangan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu factor dalam penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas Pembangunan sektor Perikanan, guna menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang dapat kami kabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut :

Formulir Kertas Kerja						
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2024				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Kelautan dan perikanan				
Dinas Terkait		Dinas Perikanan				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:						
1	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal	Berita acara pelaksanaan kegiatan dan penerimaan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Agustus	Juni	Telah dilaksanakan
2	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Dokumen hasil pemeriksanaan	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan (Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan)	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan
3	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Dokumen peta prakiraan cuaca	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan
5	Revitalisasi BBI Kabupaten Lamongan sebagai bentuk intervensi penyediaan benih unggul	Dokumen pengawasan revitalisasi BBI	Crosscheck progress pembangunan fisik lapangan (Kabid.Perikanan Budidaya)	Juni,Agustus	Juni	Dilaksanakan kunjungan lapangan
6	Monev dan Lab Kesehatan Keliling	Dokumen hasil uji kesehatan ikan dan lingkungan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan pemantauan Lab Keliling
7	Fasilitasi pameran untuk memperluas pemasaran produk olahan perikanan	Laporan pelaksanaan hasil kegiatan pameran	Kepala Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Juli	Belum dilaksanakan	Info pameran masih dicari
8	Optimalisasi dan peningkatan bantuan sarpras produksi perikanan	Dokumen proposal penerima HIBAH, dan SKT Kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Pelaksanaan pemberian bantuan masih dilaksanakan sebagian
Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:						
1	Penyediaan bantuan berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan penyediaan sarpras perikanan	Input usulan masyarakat melalui SIPD	Kesubag.Perencanaan dan Evaluasi	Januari	Januari	Telah dilakukan pemanataan
2	Pembinaan dan pendampingan administrasi kelompok	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan	Kepala Bidang Perikanan Tangkao	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Pendampingan telah dilakukan
3	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Evaluasi kepatuhan penerapan pelayanan SOP Pelayanan TPI	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT,TPI	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Evaluasi dilakukan secara rutin tribulanan
4	Optimalisasi digital banking melalui layanan QRIS	Crosscek laporan penerimaan PAD dengan karcis retribusi	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT,TPI serta Bank Jatim	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Evaluasi penerimaan PAD dilakukan secara rutin
5	Pemndampingan administrasi kelompok	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kelompok	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Checklist kelengkapan dokumen
6	Optimalisasi pemberian alat pengganti ramah lingkungan	Proposal Usulan kelompok dan SKT Kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Maret-Agustus	Maret	Pelaksanaan masih pada tahap I di bulan maret

BAB VI
PENUTUP

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan telah Menyusun dokumen dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam penanganan dan identifikasi risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD dalam Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan.



Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lamongan

Yuli Wahyuono, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196607271989031006